



**LAPORAN
KINERJA
TAHUN 2023**

**DIREKTORAT KEARSIPAN DAERAH II
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

IKHTISAR EKSEKUTIF



Sebagai bagian dari struktur organisasi ANRI berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia, Direktorat Kearsipan Daerah II harus memberikan pelaporan mengenai akuntabilitas dan kinerja yang akan menjadi bagian dari laporan akuntabilitas dan kinerja dari Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan pada khususnya dan Arsip Nasional Republik Indonesia pada umumnya. Dokumen ini merupakan

Laporan Kinerja Direktorat Kearsipan Daerah II yang didasarkan pada Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan pada Tahun 2023. Laporan Kinerja Direktorat Kearsipan Daerah II Tahun 2023 selain memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dan juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kerangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.

a. Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Direktorat Kearsipan Daerah II Tahun 2023 sebagaimana yang sudah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023, bahwa target berdasarkan sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Direktorat Kearsipan Daerah II Tahun 2023

Sasaran Program	Indikator	Target	Capaian	%
Pembinaan Kearsipan Lingkup Daerah Wilayah Barat	Indeks Peningkatan Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan Instansi Daerah Wilayah Barat	B		

Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Tahun 2023

NO.	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMPONEN/ DETIL BELANJA	TARGET	REALISASI	%
	6660	Pembinaan Kearsipan Nasional			
1.	6660.FBA.002	Lembaga Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang Dibina untuk Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan	10 Daerah	10 Daerah	100
2.	6660.FBA.004	Lembaga Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset	39 Daerah	39 Daerah	100
3.	6660.UBA 002	Instansi Pemerintah Daerah yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik	85 Daerah	85 Daerah	100

Pada pagu anggaran sebesar Rp 2.550.785.000,- (dua miliar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), terdapat pagu blokir/*automatically adjustment*, yaitu pada anggaran kegiatan Bimbingan Teknis/Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset Nasional untuk pelaksanaan di Provinsi Dearah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dengan demikian menyebabkan terjadinya perubahan Rincian Output (RO) untuk kegiatan dimaksud, yang awal total RO Satker adalah 15 Pemerintah Daerah, berubah menjadi 10 Pemerintah Daerah.

b. Akuntabilitas Keuangan

- Pada tahun 2023 Direktorat Kearsipan Daerah II mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp 2.550.785.000,-** (dua milyar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Realisasi anggaran tahun 2023 adalah sebesar **Rp 2.462.015.909,-** (dua miliar empat ratus enam puluh dua juta lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau 96,52% dari total anggaran **Rp 2.550.785.000,-** (dua milyar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Direktorat Kearsipan Daerah II
Tahun 2023

Kode Prog/Keg	Program/Kegiatan/Indikator	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
6660	Pembinaan Kearsipan Nasional	2.550.785.000	2.462.015.909	96,52
6660.FBA.002	Lembaga Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang Dibina untuk Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan	102.124.000	102.105.000	99,98
6660.FBA.004	Lembaga Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset	103.661.000	100.283.903	96,74
6660.UBA.002	Instansi Pemerintah Daerah yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik	2.345.000.000	2.259.627.006	96,36

KATA PENGANTAR

Pertama-tama puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Direktorat Kearsipan Daerah II Tahun 2023. LAKIN ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIN ini menyajikan capaian kinerja Direktorat Kearsipan Daerah II tahun 2023 yang diperbandingkan dengan penetapan kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan di masa mendatang. LAKIN Direktorat Kearsipan Daerah II selain memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dan juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kerangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun secara umum hasil capaian kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan di Direktorat Kearsipan Daerah II tahun 2023 dapat memenuhi target, namun tidak dapat pula kami pungkiri masih ada beberapa indikator kinerja yang masih berproses. Kami berharap analisis dan evaluasi LAKIN Direktorat Kearsipan Daerah II Tahun 2023 dapat memberikan dorongan dan semangat dari seluruh komponen khususnya di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sehingga penyelenggaraan kearsipan secara nasional dapat berjalan dengan baik dan benar yang pada akhirnya mempercepat perwujudan *Good Governance dan Clean Government* serta menjadikan arsip sebagai sumber informasi dan edukasi.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna. Kami mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif untuk peningkatan kualitas pelaporan ke depan.

Jakarta, 29 Januari 2024
Direktur Kearsipan Daerah II,



Suminarsih, SS, M.Hum

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	2
a. Akuntabilitas Kinerja.....	2
b. Akuntabilitas Keuangan.....	3
KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI	6
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Gambaran Umum	9
1.3 Struktur Organisasi	10
1.4 Isu Strategis Organisasi	10
1.5. Sistematika Ruang Lingkup dan Pelaporan.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	13
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	14
2.3 Perjanjian Kinerja	15
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	16
2.5 Rencana Penarikan Dana	18
2.6 Metode Pengukuran	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	20
3.2 Capaian Kinerja Anggaran	22
BAB IV PENUTUP	32
DAFTAR LAMPIRAN	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencapai cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan oleh negara.

Untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat serta mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang andal.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara dan khususnya pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagaimana dijabarkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup tugas ANRI sebagai penyelenggara negara di bidang kearsipan diuraikan dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yaitu penyelenggaraan kearsipan yang meliputi keseluruhan penetapan

kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh SDM, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Ruang lingkup dimaksud meliputi juga kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan, serta lembaga kearsipan.

Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan adalah unsur pelaksana ANRI yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kearsipan nasional. Salah satu bagian dari Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan yaitu Direktorat Kearsipan Daerah II.

1.2. Gambaran Umum (Organisasi/Unit Kerja)

Direktorat Kearsipan Daerah II mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pengendalian di bidang penyelenggaraan kearsipan daerah II, meliputi Pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten dan pemerintah kabupaten/kota serta BUMD di wilayah tersebut.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Kearsipan Daerah II menyelenggarakan fungsi:

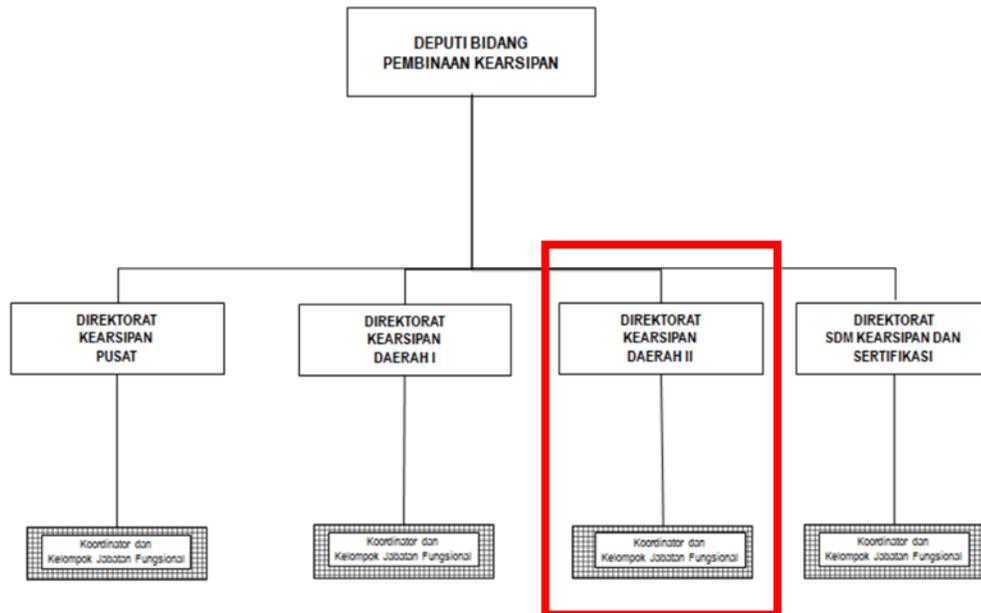
1. penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang bimbingan, supervisi, fasilitasi, konsultasi implementasi penyelenggaraan kearsipan, penerapan sistem informasi kearsipan, penggunaan prasarana dan sarana kearsipan, persetujuan Jadwal Retensi Arsip, pemberdayaan lembaga kearsipan daerah pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan BUMD, serta pelaporan arsip terjaga di wilayah II;
2. penyiapan pemberian bimbingan di bidang bimbingan, supervisi, fasilitasi, konsultasi implementasi penyelenggaraan kearsipan, penerapan sistem informasi kearsipan, penggunaan prasarana dan sarana kearsipan, persetujuan Jadwal Retensi Arsip, pemberdayaan lembaga kearsipan daerah pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan BUMD, serta pelaporan arsip terjaga di wilayah II;
3. penyiapan pengendalian di bidang bimbingan, supervisi, fasilitasi, konsultasi implementasi penyelenggaraan kearsipan, penerapan sistem informasi kearsipan, penggunaan prasarana dan sarana kearsipan, persetujuan Jadwal Retensi Arsip, pemberdayaan lembaga kearsipan daerah pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan BUMD, serta pelaporan arsip terjaga di wilayah II;

1.3 Struktur Organisasi

Direktorat Kearsipan Daerah II dipimpin oleh Direktur. Susunan organisasi Direktorat Kearsipan Daerah II terdiri atas Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Direktorat Kearsipan Daerah II



Adapun sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Kearsipan Daerah II berjumlah 15 pegawai terdiri dari 1 orang Pejabat Struktural, dan 14 orang pejabat fungsional.

1.4 Isu Strategis

Berkaitan dengan geopolitik dan geostrategis baik secara nasional, regional, dan internasional, yang berlangsung saat ini, maka beberapa isu strategis Direktorat Kearsipan Daerah II, yaitu:

- Norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK) kearsipan di lingkungan pencipta arsip dan lembaga kearsipan masih belum optimal dalam rangka mempercepat proses pencapaian tujuan penyelenggaraan kearsipan nasional;
- Sistem dan metode kearsipan juga belum dikembangkan secara nyata untuk dapat merangsang dan menstimulasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kearsipan. Kolaborasi antarpemangku kepentingan (*stakeholder*) masih lemah dan masih ego sektoral.

- c. Pengelolaan arsip dinamis yang komprehensif dan terpadu dalam mendukung pencapaian reformasi birokrasi (RB) dan gerakan nasional sadar tertib arsip (GNSTA) belum terlaksana secara optimal, sehingga masih ada pencipta arsip (tingkat pusat dan daerah) yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis secara parsial dan indeks hasil pengawasan kearsipannya masih rendah;
- d. Belum semua Pemerintah Daerah mengimplementasikan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, efisien, serta fondasi *knowledge management*;
- e. Arsip resmi pemerintah terkait pandemi Covid-19 harus diselamatkan dan dilestarikan secara tepat oleh pencipta arsip dan lembaga kearsipan sebagai warisan dokumenter untuk memahami, mengontekstualisasikan, dan mengatasi masalah serupa di masa depan;
- f. Jumlah SDM kearsipan/Arsiparis yang belum sesuai dengan kebutuhan dan belum merata serta masih rendah kompetensinya, khususnya di bidang pengelolaan arsip berbasis digital.

Belum optimalnya kelembagaan kearsipan di lingkungan pemerintahan daerah dan perguruan tinggi negeri sesuai dengan amanat UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

1.5 Sistematika dan Ruang Lingkup Pelaporan

Penyajian LAKIN terdiri dari empat (4) bab dan beberapa lampiran serta Ikhtisar Eksekutif.

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Gambaran Umum
- 1.3 Struktur Organisasi
- 1.4 Isu Strategis Organisasi
- 1.5 Sistematika dan Ruang Lingkup Pelaporan

Bab 2 Perencanaan Kinerja

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- 2.3 Perjanjian Kinerja
- 2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
- 2.5 Rencana Penarikan Dana
- 2.6 Metode Pengukuran

Bab 3 Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.2 Capaian Kinerja Anggaran

Bab 4 Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kearsipan telah disusun dalam Rencana Strategis ANRI Tahun 2020-2024. Dalam renstra tersebut, ANRI telah menyusun strategi pengembangan dan pembinaan bidang kearsipan untuk memberikan dampak nyata terhadap upaya perwujudan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Arah kebijakan sasaran strategis pembangunan bidang kearsipan adalah:

1. Meningkatnya kepatuhan lembaga pemerintah dan lembaga publik terhadap kebijakan kearsipan;
2. Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional;
3. Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima; dan
4. Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI.

Pada tiap sasaran strategis diperlukan arah kebijakan dan strategi agar dampak yang dihasilkan dapat lebih optimal. Khusus pada arah kebijakan dari Sasaran Strategis “Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan” meliputi:

- a. Peningkatan Kualitas Kebijakan Kearsipan melalui strategi Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan. Dalam hal ini perlu dilakukan deregulasi dan debirokratisasi bidang kearsipan melalui revitalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kearsipan yang selaras dengan lingkungan digital. Selain itu juga perlu dipastikan bahwa NSPK yang ditetapkan dapat diimplementasikan.
- b. Peningkatan Kapabilitas Penyelenggara Kearsipan melalui strategi:
 - 1) Pengembangan dan sertifikasi SDM Kearsipan;
 - 2) Pembinaan Kearsipan pada lingkup pusat; dan
 - 3) Pembinaan Kearsipan pada lingkup daerah.

Fokus pembinaan diarahkan pada kemampuan mengelola arsip secara digital. Sedangkan pada pengembangan SDM Kearsipan, perlu diupayakan pengembangan kompetensi berbasis kepakaran. Spesialisasi tidak bisa dihindari, para Arsiparis diharapkan mampu berkontribusi nyata bagi lingkungan kerjanya.

Adapun Rincian Indikator Kinerja Utama dan Target Keluaran Direktorat Kearsipan Daerah II sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023

No.	Unit Kerja/Kegiatan/ KRO/RO	IKK	Target
1	Pembinaan Kearsipan Nasional	Indeks Peningkatan Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kersipan/Lembaga Kearsipan Instansi Daerah Wilayah Barat	3,62

II.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Prioritas Nasional, dan Pagu Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan ANRI, khususnya dalam pembinaan di bidang penyelenggaraan kearsipan secara nasional sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Strategis ANRI 2020-2024, dilaksanakan oleh Direktorat Kearsipan Daerah II yang berada di bawah Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, pada tahun anggaran 2023 telah ditetapkan program kegiatan pembinaan kearsipan tingkat daerah sebagai berikut:

1. Penerapan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (SRIKANDI);
2. Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset;
3. Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan;

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, perlu penjabaran berbagai program kegiatan kedalam program kerja tahunan. Mengingat perlunya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan negara untuk membiayai kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan, Direktorat Kearsipan Daerah II menerapkan skala prioritas dalam menentukan program kerja tahun anggaran 2023.

Pada tahun anggaran 2023 Direktorat Kearsipan Daeah II mendapat anggaran untuk kegiatan rupiah murni sebesar Rp 2.550.785.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.2

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Kearsipan Daerah II Tahun 2023

NO.	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ SUBOUTPUT/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN/ DETIL BELANJA	TARGET	PAGU ANGGARAN (RP)
	087.01.CN	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional		
	6660	Pembinaan Kearsipan Nasional		2.550.785.000
1.	6660.FBA.002	Lembaga Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang dibina untuk Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan	39 Pemda	102,124,000
2.	6660.FBA.004	Lembaga Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset Nasional	10 Pemda	103,661,000
3.	6660.UBA 002	Lembaga Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang Menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (SRIKANDI)	85 Pemda	2,345,000,000

Di samping melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan dalam Program Kerja Tahunan ANRI Tahun Anggaran 2023 dan disediakan pendanaannya melalui anggaran DIPA ANRI.

II.3 Perjanjian Kinerja Direktorat Kearsipan Daerah Tahun 2023

Penetapan kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber dayayang tersedia. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023.

Sasaran yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Kearsipan Daerah II Tahun 2023 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran dan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023. Dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Direktur Kearsipan Daerah II tahun 2023 adalah Meningkatnya Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan Instansi Daerah Wilayah Barat.

Direktorat Kearsipan Daerah II telah membuat penetapan kinerja tahun 2023 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEARSIPAN DAERAH II			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan Instansi Daerah Wilayah Barat	Indeks Peningkatan Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kearsipan /Lembaga Kearsipan Instansi Daerah Wilayah Barat	3,62

Kegiatan:
Pembinaan Kearsipan Nasional

Anggaran:
Rp2.550.785.000

Jakarta, 17 November 2023

Pihak Kedua,

Dra. Desi Pratiwi, MIM

Pihak Pertama,

Suminarsih, S.S, M.Hum

Gambar 2.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Kearsipan Daerah II

II. 4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Adapun Rencana Aksi Direktorat Kearsipan Daerah II memuat 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Kegiatan tersebut memiliki target yang sesuai dengan Renstra Tahun 2020-2024, sebagaimana yang termuat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Direktorat Kearsipan Daerah II Tahun 2023

NO	KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	TARGET			
					I	II	III	IV
1.	Pembinaan Kearsipan Lingkup Daerah Wilayah Barat	Meningkatnya Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan Instansi Daerah Wilayah Barat	Indeks Peningkatan Kapabilitas Penyelenggaraan Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan Instansi Daerah Wilayah Barat	3,62 Indeks	-	Melakukan pendampingan dalam penyusunan instrumen kearsipan sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	Mendorong identifikasi arsip terjaga dan arsip aset pada instansi pemerintah	Peningkatan Kapabilitas penyelenggaraan kearsipan diperoleh dengan membandingkan jumlah daerah yang memiliki nilai rata-rata CC ke atas dalam LAKE dengan keseluruhan jumlah lembaga kearsipan wilayah barat dan dikonversi menjadi indeks B
			- Jumlah Lembaga Pemerintah Wilayah Barat yang Dibina untuk Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan	39 Prov/Kab/Kota	Workshop Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan (39 Prov/Kab/Kota)	-	Evaluasi Kegiatan Pembinaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	-
			- Jumlah Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang menerima pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset	15 Prov/Kab/Kota	Identifikasi instansi pemerintah yang akan menerima pembinaan pengelolaan arsip terjaga dan arsip aset	Bimbingan Teknis Pembinaan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset pada Pemerintah Daerah	Evaluasi Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset	-

NO	KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	TARGET			
					I	II	III	IV
			- Jumlah Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagai Pakai Berbasis Elektronik (SRIKANDI)	85 Prov/Kab/Kota	-	Bimbingan Teknis Pendampingan Penerapan Aplikasi SRIKANDI di 85 Provinsi/Kabupaten/Kota	Pendampingan Konfigurasi Data Penerapan Aplikasi SRIKANDI	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Aplikasi SRIKANDI
							Pelaksanaan Workshop Penerapan Aplikasi SRIKANDI	

II. 5 Rencana Penarikan Dana

Tabel 2.4

Rencana Penarikan Dana Direktorat Kearsipan Daerah II

No.	Kegiatan/KRO/RO	Pagu Revisi	Rencana Penarikan Dana Tahun 2023
6660	Pembinaan Kearsipan Nasional	2.550.785.000	2.550.785.000
6660.FBA. 002	Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang Dibina untuk Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan	102.124.000	102.124.000
6660.FBA.004	Lembaga Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset	103.661.000	103.661.000
6660.UBA.002	Instansi Pemerintah Daerah yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagai Pakai Berbasis Elektronik	2.345.000.000	2.345.000.000

II. 6 Metode Pengukuran

Sesuai dengan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tingkat Lembaga, Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri Tahun 2020-2024 di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, uraian atau deskripsi dari sasaran program adalah Pembinaan kearsipan pada Kementerian/Lembaga/Daerah difokuskan pada rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan yang meliputi kebijakan (tata naskah, klasifikasi arsip, sistem klasifikasi keamanan

dan akses arsip dinamis, jadwal retensi arsip, Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif, Pedoman Penyusutan Arsip, dan Pedoman Pengelolaan Arsip Vital), Pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun, pengelolaan arsip statis dan sumber daya kearsipan (SDM Kearsipan, Organisasi kearsipan, Prasarana dan Sarana kearsipan dan pendanaan) untuk mewujudkan tertib arsip. Dengan nilai keberhasilan diklasifikasikan atas:

NO	Nilai Indeks	Persentase lembaga yang memiliki nilai B ke atas
1	AA	90%-100%
2	A	80%-89,99%
3	BB	70%-79,99%
4	B	60%-69,99%
5	CC	50%-59,99%
6	C	30%-49,99%
7	D	0-29%

Sumber Data: Laporan hasil pengawasan hasil kearsipan yang telah ditetapkan Kepala ANRI.

Cara Menghitung

Indeks Kapabilitas Penyelenggara Kearsipan (Direktorat Kearsipan Daerah II):

Akumulasi Target (Lembaga Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang Dibina untuk Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan) Tahun 2020 s.d. 2023 dibagi dengan Jumlah Rekomendasi, yang dikurangi dengan akumulasi target tahun sebelumnya dan tahun berjalan (Tahun 2022 dan Tahun 2023), dikali 100.

IKK/RO	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023
Lembaga Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang Dibina untuk Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan	0	36	36	36

$$=108/(3055-72)*100$$

$$=3,62$$

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Selama tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan yang terkait dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Direktorat Kearsipan Daerah II, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Direktorat Kearsipan Daerah II Tahun 2023

KODE	IKK/RO	Rencana Kinerja	Capaian Kinerja
IKK	Indeks Peningkatan Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kersipan/ Lembaga Kearsipan Instansi Daerah Wilayah Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Workshop Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan di Bogor 2) Evaluasi Kegiatan Pembinaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 3) Bimbingan Teknis Pembinaan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset kepada Instansi Pemerintah 4) Evaluasi Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset 5) Workshop Penerapan Aplikasi SRIKANDI di Jakarta 6) Pendampingan Konfigurasi Data Penerapan Aplikasi SRIKANDI 7) Bimbingan Teknis Pendampingan Penerapan Aplikasi SRIKANDI 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Workshop Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan di Bogor 2) Evaluasi Kegiatan Pembinaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 3) Bimbingan Teknis Pembinaan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset kepada Instansi Pemerintah 4) Evaluasi Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset 5) Workshop Penerapan Aplikasi SRIKANDI di Jakarta 6) Pendampingan Konfigurasi Data Penerapan Aplikasi SRIKANDI 7) Bimbingan Teknis

KODE	IKK/RO	Rencana Kinerja	Capaian Kinerja
		8) Monitoring dan Evaluasi Penerapan Aplikasi SRIKANDI di Jakarta	Pendampingan Penerapan Aplikasi SRIKANDI 8) Monitoring dan Evaluasi Penerapan Aplikasi SRIKANDI di Jakarta
6660.FBA.002	Lembaga Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang Dibina untuk Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan	1) Workshop Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan di Bogor 2) Evaluasi Kegiatan Pembinaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1) Workshop Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan di Bogor 2) Evaluasi Kegiatan Pembinaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
6660.FBA.004	Lembaga Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset	1) Bimbingan Teknis Pembinaan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset kepada Instansi Pemerintah 2) Evaluasi Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset	1) Bimbingan Teknis Pembinaan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset kepada Instansi Pemerintah 2) Evaluasi Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset
6660.UBA.002	Instansi Pemerintah Daerah yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik	1) Workshop Penerapan Aplikasi SRIKANDI di Jakarta 2) Pendampingan Konfigurasi Data Penerapan Aplikasi SRIKANDI 3) Bimbingan Teknis Pendampingan Penerapan Aplikasi SRIKANDI 4) Monitoring dan Evaluasi Penerapan Aplikasi SRIKANDI di Jakarta	1) Workshop Penerapan Aplikasi SRIKANDI di Jakarta 2) Pendampingan Konfigurasi Data Penerapan Aplikasi SRIKANDI 3) Bimbingan Teknis Pendampingan Penerapan Aplikasi SRIKANDI 4) Monitoring dan Evaluasi Penerapan Aplikasi SRIKANDI di Jakarta

Pada Tahun 2023, Direktorat Kearsipan Daerah II sudah melakukan perencanaan kegiatan baik dari segi SDM pelaksana, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, mekanisme, strategi dan teknis pelaksanaan kegiatan, serta koordinasi dengan wilayah binaan. Meskipun pada awal tahun mengalami penundaan dalam pelaksanaan kegiatan, namun akhir Desember 2023 kegiatan yang dibiayai dari anggaran DIPA ANRI untuk Direktorat Kearsipan Daerah II telah dilaksanakan semuanya atau terlaksana sebesar 100%.

3.2. Capaian Kinerja Anggaran

Realisasi Anggaran Direktorat Kearsipan Daerah II pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Anggaran Direktorat Kearsipan Daerah II Tahun 2023

No.	Kegiatan/KRO/RO	Pagu (Rp) Tahun 2023	Penyerapan (Rp) Tahun 2023	%
6660	Pembinaan Kearsipan Nasional	2.550.785.000	2.462.015.909	96,52
6660.FBA.002	Lembaga Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang Dibina untuk Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan	102.124.000	102.105.000	99,98
6660.FBA.004	Lembaga Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset	103.661.000	100.283.903	96,74
6660.UBA.002	Instansi Pemerintah Daerah yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik	2.345.000.000	2.259.627.006	96,36

Dalam rencana kinerja Tahun Anggaran 2023, Direktorat Kearsipan Daerah II membagi pelaksanaan program kerja ke masing-masing unit sesuai dengan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya dengan rincian sebagai berikut:

- A. Lembaga Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang dibina untuk menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan.

Pada Tahun Anggaran 2023 telah terlaksana rangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Workshop Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan di Bogor
2. Evaluasi Kegiatan Pembinaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Adapun pemerintah Daerah yang dibina untuk menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan dengan capaian target sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Daerah, yaitu:

- 1) Kabupaten Lima Puluh Kota
- 2) Kota Pematang Siantar
- 3) Kabupaten Pasaman Barat
- 4) Kabupaten Dharmasraya
- 5) Kabupaten Tapanuli Selatan
- 6) Kota Dumai
- 7) Kabupaten Solok
- 8) Kabupaten Dairi
- 9) Kota Tebing Tinggi
- 10) Kabupateh Tanah Datar
- 11) Kabupaten Indragiri Hilir
- 12) Kabupaten Rokan Hulu
- 13) Kabupaten Aceh Utara
- 14) Kota Sungai Penuh
- 15) Kota Banjar
- 16) Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 17) Kabupaten Ciamis
- 18) Kota Bandar Lampung
- 19) Kabupaten Bengkulu Selatan
- 20) Kabupaten Musi Rawas Utara
- 21) Kabupaten Pring Sewu
- 22) Kota Lubuk Linggau
- 23) Kabupaten Ogan Ilir
- 24) Kabupaten Belitung
- 25) Kabupaten Indramayu
- 26) Kabupaten Bangka
- 27) Kabupaten Karawang
- 28) Kabupaten Serang
- 29) Kabupaten Situbondo
- 30) Kabupaten Banjarnegara
- 31) Kabupaten Sampang

- 32) Kabupaten Rembang
- 33) Kabupaten Pamekasan
- 34) Kota Tegal
- 35) Kabupaten Sukoharjo
- 36) Kabupaten Sragen
- 37) Kabupaten Pemalang
- 38) Kabupaten Jember
- 39) Kabupaten Bojonegoro

Adapun penyerapan anggaran kegiatan sebesar Rp 102.105.000,- (seratus dua juta seratus lima ribu rupiah) atau 99,98% dari anggaran yang tersedia Rp 102.124.000,- (seratus dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah).

B. Lembaga Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset

Pada Tahun Anggaran Tahun 2023 telah terlaksana rangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Identifikasi Instansi Pemerintah yang akan menerima Pembinaan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset;
2. Bimbingan Teknis Pembinaan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset kepada Instansi Pemerintah;
3. Evaluasi Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset.

Pendampingan Penyusunan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset dengan capaian target sebanyak 10 (sepuluh) Daerah yaitu:

1. Bertempat di Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau (Tanjungpinang) dengan peserta terdiri dari:
 - a. Provinsi Kepulauan Riau
 - b. Kabupaten Bintan
 - c. Kabupaten Kepulauan Anambas
 - d. Kabupaten Natuna
 - e. Kota Tanjungpinang
2. Bertempat di Ibu Kota Provinsi Jawa Barat (Bandung) dengan peserta terdiri dari:
 - a. Provinsi Jawa Barat
 - b. Kabupaten Bandung
 - c. Kabupaten Ciamis

- d. Kabupaten Pangandaran
- e. Kota Bandung

Terdapat pagu blokir/*automatically adjustment*, yaitu pada anggaran kegiatan Bimbingan Teknis/Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset Nasional untuk pelaksanaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu: Bertempat di Ibu Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Yogyakarta) dengan peserta terdiri berasal dari:

- a. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Kabupaten Bantul
- c. Kabupaten Gunung Kidul
- d. Kabupaten Kulon Progo
- e. Kota Yogyakarta

Untuk itu, kegiatan Bimbingan Teknis/Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset tidak dapat dilaksanakan pada daerah di atas. Dengan demikian menyebabkan terjadinya perubahan Rincian Output (RO) untuk kegiatan dimaksud, yang awal total RO Satker adalah 15 Pemerintah Daerah, berubah menjadi 10 Pemerintah Daerah.

Dari 10 Pemerintah Daerah yang menjadi target program Penyusunan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset tercapai 100% dengan output tersusunnya draf Peraturan Gubernur, Bupati/Walikota tentang Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota serta Daftar Arsip Terjaga dan Arsip Aset.

Adapun anggaran yang terserap sebesar **Rp 100.283.903,-** (seratus juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) atau **96,74%** dari anggaran sebesar **Rp 103.661.000,-** (seratus tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

C. Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang Menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (SRIKANDI).

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Workshop Penerapan Aplikasi SRIKANDI di Jakarta

2. Pendampingan Konfigurasi Data Penerapan Aplikasi SRIKANDI di Jakarta
3. Bimbingan Teknis Pendampingan Penerapan Aplikasi SRIKANDI di lingkungan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang dilaksanakan di 12 Provinsi, yaitu:
 - a. Provinsi Aceh
 - b. Provinsi Sumatera Utara
 - c. Provinsi Sumatera Barat
 - d. Provinsi Riau
 - e. Provinsi Kepulauan Riau (Kabupaten Lingga)
 - f. Provinsi Sumatera Selatan
 - g. Provinsi Bengkulu
 - h. Provinsi Lampung
 - i. Provinsi Banten
 - j. Provinsi Jawa Barat
 - k. Provinsi Jambi
 - l. Provinsi Jawa Tengah
 - m. Provinsi Jawa Timur

Adapun capaian target pada Tahun Anggaran 2023 terdapat 85 (delapan puluh) pemerintah daerah yang telah menerapkan Aplikasi SRIKANDI, yaitu:

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
1	Kabupaten Rokan Hilir
2	Kabupaten Indragiri Hilir
3	Kabupaten Lingga
4	Kabupaten Samosir
5	Kabupaten Labuhan Batu
6	Kabupaten Humbang Hasundutan
7	Kabupaten Simalungun
8	Kabupaten Batu Bara
9	Kabupaten Tapanuli Tengah
10	Kabupaten Padang Lawas
11	Kabupaten Toba
12	Kabupaten Asahan
13	Kota Tanjung Balai
14	Kota Sibolga
15	Kota Pematangsiantar
16	Kota Binjai

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
17	Kabupaten Tapanuli Selatan
18	Kabupaten Limapuluh Kota
19	Kabupaten Solok Selatan
20	Kabupaten Kepulauan Mentawai
21	Kota Pariaman
22	Kabupaten Pasaman
23	Kabupaten Pesisir Selatan
24	Kabupaten Aceh Tengah
25	Kabupaten Aceh Utara
26	Kabupaten Aceh Timur
27	Kabupaten Bireun
28	Kabupaten Aceh Tamiang
29	Kabupaten Aceh Barat
30	Kabupaten Karawang
31	Kabupaten Tanjung Jabung Barat
32	Kabupaten Garut
33	Kabupaten Merangin
34	Kabupaten Cianjur
35	Kabupaten Sarolangun
36	Kabupaten Musirawas
37	Kabupaten Pringsewu
38	Kabupaten Lampung Timur
39	Kabupaten Lebong
40	Kabupaten Bandung Barat
41	Kota Bengkulu
42	Kota Sungai Penuh
43	Kabupaten Batanghari
44	Kabupaten Musi Rawas Utara
45	Kabupaten Muaro Jambi
46	Kabupaten Empat Lawang
47	Kabupaten Lampung Selatan
48	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
49	Kabupaten Pangandaran
50	Kota Banjar
51	Kota Pagar Alam
52	Kota Prabumulih
53	Kabupaten Indramayu
54	Kota Bekasi

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
55	Kabupaten Kuningan
56	Kota Bandar Lampung
57	Kabupaten Wonogiri
58	Kabupaten Brebes
59	Kabupaten Karanganyar
60	Kabupaten Pasuruan
61	Kabupaten Mojokerto
62	Kabupaten Grobogan
63	Kabupaten Rembang
64	Kota Tegal
65	Kabupaten Ngawi
66	Kabupaten Batang
67	Kabupaten Pandeglang
68	Kabupaten Nganjuk
69	Kabupaten Blitar
70	Kabupaten Situbondo
71	Kabupaten Malang
72	Kabupaten Kulonprogo
73	Kabupaten Gresik
74	Kabupaten Magetan
75	Kabupaten Lumajang
76	Kabupaten Pacitan
77	Kabupaten Tegal
78	Kabupaten Sampang
79	Kota Tangerang Selatan
80	Kota Tangerang
81	Kota Serang
82	Kabupaten Serang
83	Kota Blitar
84	Kabupaten Tuban
85	Kabupaten Ponorogo

Pada Tahun 2023 serapan anggaran sebesar **Rp 2.259.627.006** (dua milyar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam rupiah) atau **96,36%** dari anggaran yang tersedia sebesar **Rp 2.345.000.000** (dua milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah).

Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran Direktorat Kearsipan Daerah II pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran Direktorat Kearsipan Daerah II Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan/KRO/RO	Pagu (Rp)	Target Output	Capaian Target		Realisasi Anggaran	
		(Rp)	(Volume)	(Volume)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
6660	Pembinaan Kearsipan Nasional	2.550.785.000	134 Daerah	134 Daerah	100	2.462.015.909.	96,52
6660.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	205.785.000	49 Daerah	49 Daerah	100	202.388.903	98,36
6660.FBA.002	Lembaga Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang Dibina untuk Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan	102.124.000	39 Daerah	39 Daerah	100	102.105.000	99,98
6660.FBA.004	Lembaga Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset	103.661.000.	10 Daerah	10 Daerah	100	100.283.903	96,74
6660.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	2.345.000.000	85 Daerah	85 Daerah	100	2.259.627.006	98,81
6660.UBA.002	Instansi Pemerintah Daerah yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik	2.345.000.000	85 Daerah	85 Daerah	100	2.259.627.006	96,36

Realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar **Rp 2.462.015.909,-** (dua miliar empat ratus enam puluh dua juta lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) atau 96,56% dari anggaran yang tersedia pada Direktorat Kearsipan Daerah II sebesar Rp 2.550.785.000 (dua miliar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Adapun sisa anggaran sebesar Rp 88.769.091,- (delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dikarenakan sisa tiket perjalanan dinas, akomodasi dan rapat.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, presentase capaian anggaran di tahun 2023 ini mengalami kenaikan, yaitu sebesar 5,93% yang awalnya 90,59%, naik menjadi 96,52%, dengan detail sebagai berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran Direktorat Kearsipan Daerah II
Tahun 2022 dan 2023

Kegiatan/KRO/RO	Pagu (Rp) Tahun 2022	Penyerapan (Rp) Tahun 2022	%	Pagu (Rp) Tahun 2023	Penyerapan (Rp) Tahun 2023	%
Pembinaan Kearsipan Nasional	3.097.650.000	2.800.741.655	90,59	2.550.785.000	2.462.015.909	96,52
Lembaga Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang Dibina untuk Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan	134.176.000	123.360.000	91,94	102.124.000	102.105.000	99,98
Lembaga Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset	113.224.000	95.248.000	84,12	103.661.000	100.283.903	96,74
Instansi Pemerintah Daerah yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik	2.850.250.000	2.582.133.656	97,89	2.345.000.000	2.259.627.006	96,36

HAMBATAN DAN PEMECAHAN MASALAH

Dalam pelaksanaan Program Kerja Tahun Anggaran 2023, Direktorat Kearsipan Daerah II Tahun mengalami beberapa kendala dan hambatan, antara lain:

- a. Belum optimalnya Komitmen Pimpinan (Kepala Daerah), kesiapan Lembaga Kearsipan, Kapabilitas Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan dalam mengelola penerapan Aplikasi SRIKANDI masih kurang memadai;
- b. Adanya aplikasi khusus/sejenis *existing*, sehingga Pemerintah Daerah enggan untuk beralih kepada implementasi aplikasi SRIKANDI;
- c. Sering terjadinya gangguan/*error* pada aplikasi SRIKANDI dari Kominfo Pusat, sehingga menghambat proses pelatihan, injeksi, migrasi, serta implemtasi aplikasi SRIKANDI secara keseluruhan;
- d. Hilangnya *database* Pemerintah Daerah yang terinput di aplikasi SRIKANDI layanan pada kurun waktu Maret-Juni 2022 (terakhir ter-back up data). Untuk itu, daerah harus melakukan penginputan ulang. Padahal, terdapat daerah yang sudah hendak beralih dari akun layanan ke akun *live*, menjadi tertunda karena hendak melengkapi data yang hilang terlebih dahulu.
- e. Masih terdapat beberapa pemerintah daerah yang belum memiliki instrumen pengelolaan arsip dinamis secara lengkap;
- f. Daerah harus menyesuaikan dengan peraturan terbaru yang dapat memengaruhi nilai hasil pengawasan kearsipan;

- g. Sumber Daya Manusia yang ditunjuk sebagai peserta atau pengelola arsip berubah-ubah;
- h. Rendahnya tingkat pemahaman terhadap arsip terjaga dan arsip aset;
- i. Terdapat pagu blokir/*automatically adjustment*, yaitu pada anggaran kegiatan Bimbingan Teknis/Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset Nasional untuk pelaksanaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebabkan terjadinya perubahan Rincian Output (RO) untuk kegiatan dimaksud. Pada awal total RO Satker adalah 15 Pemerintah Daerah, berubah menjadi 10 Pemerintah Daerah;
- j. Adanya kegiatan rapat yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah diatur sebelumnya, dikarenakan kepadatan jadwal kegiatan dan mobilitas pegawai di Direktorat Kearsipan Daerah II yang tinggi karena tugas luar, sehingga harus diatur waktu yang tepat agar mayoritas pegawai dapat mengikuti kegiatan dimaksud.

Berdasarkan uraian kendala dan hambatan yang telah diuraikan di atas, berikut ini langkah-langkah upaya pemecahan masalah, sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi/kolaborasi pada tingkat pimpinan tinggi;
2. Pemberdayaan Lembaga Kearsipan Daerah;
3. Peningkatan koordinasi/kolaborasi dengan Tim SPBE Nasional melalui Pusat Data dan Informasi ANRI;
4. Pengembangan SRIKANDI Versi 3 oleh ANRI, untuk menyempurnakan dan mengatasi permasalahan yang terdapat pada SRIKANDI Versi 2;
5. Peningkatan koordinasi/kolaborasi dengan unit Pusat Akreditasi Kearsipan ANRI, agar tercipta harmonisasi antara kegiatan pembinaan dan pengawasan kearsipan;
6. Peningkatan kapasitas Arsiparis dan Pengelola Arsip di daerah terhadap pengelolaan arsip melalui bimbingan teknis secara *online*;
7. Peningkatan layanan konsultasi kearsipan secara intensif, baik secara tatap muka/*offline* maupun melalui *mobile* melalui aplikasi (*online*);
8. Pematangan penyusunan *timeline* kegiatan dengan melibatkan seluruh personil unit kerja.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat Kearsipan Daerah II Tahun Anggaran Tahun 2023 disampaikan secara akurat yang memuat segala kegiatan yang ada di Direktorat Kearsipan Daerah II, maupun hambatan/permasalahan yang dihadapi. Pelaksanaan program kerja tahun 2023 Direktorat Kearsipan Daerah II yang dibiayai melalui DIPA ANRI tahun 2023 telah terlaksana secara keseluruhan atau sebesar 100%. Disamping itu, realisasi anggaran juga terserap secara optimal sebesar 96,52% telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang tersedia, sedangkan sisanya sebesar 3,48% merupakan sisa pengembalian tiket perjalanan dinas, akomodasi dan rapat.

Kegiatan yang ada di Direktorat Kearsipan Daerah II merupakan tugas pembinaan yang harus dilaksanakan ke pemerintah daerah khususnya dalam rangka terselenggaranya penyelenggaraan kearsipan secara baik dan benar pada wilayah pembinaan Kearsipan Daerah II, sehingga anggaran pembinaan yang tersedia harus bisa dioptimalkan. Selain itu, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan rencana strategis Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, juga memperhatikan nilai hasil pengawasan kearsipan.

Perkembangan teknologi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk mengintensifkan kegiatan pembinaan, koordinasi, dan komunikasi dengan Daerah binaan, yaitu dengan menggunakan aplikasi *mobile/online*, sehingga kegiatan pembinaan tidak hanya terbatas secara konvensional/tatap muka saja. Selain itu, koordinasi, kolaborasi dan sinergi dengan unit kerja internal terkait juga dibutuhkan untuk mendukung dan memperlancar kegiatan pembinaan.

Jakarta, 30 Januari 2024

Direktur Kearsipan Daerah II,



Suminarsih, SS, M.Hum

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 REVISI KE-1

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suminarsih, S.S, M.Hum

Jabatan : Direktur Kearsipan Daerah II

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Dra. Desi Pratiwi, MIM

Jabatan : Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 November 2023

Pihak Kedua,

Dra. Desi Pratiwi, MIM

Pihak Pertama,

Suminarsih, S.S, M.Hum

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEARSIPAN DAERAH II**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan Instansi Daerah Wilayan Barat	Indeks Peningkatan Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kearsipan /Lembaga Kearsipan Instansi Daerah Wilayah Barat	3,62

Kegiatan:

Pembinaan Kearsipan Nasional

Anggaran:

Rp2.550.785.000

Jakarta, 17 November 2023

Pihak Kedua,



Dra. Desi Pratiwi, MIM

Pihak Pertama,



Suminarsih, S.S, M.Hum

Lampiran 2

RENCANA AKSI DIREKTORAT KEARSIPAN DAERAH II
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	TARGET			
					I	II	III	IV
			- Jumlah Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbasis Pakal Berbasis Elektronik (SRIKANDI)	85 Provinsi/Kab/Kota	-	Bimbingan Teknis Pendampingan Penerapan Aplikasi SRIKANDI di 85 Provinsi/Kabupaten/Kota	Pendampingan Konfigurasi Data Penerapan Aplikasi SRIKANDI	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Aplikasi SRIKANDI
			- Persetujuan Jadwal Retensi Arsip	20 Persetujuan Jadwal Retensi Arsip	5 JRA	5 JRA	5 JRA	5 JRA
							Pelaksanaan Workshop Penerapan Aplikasi SRIKANDI	
NO	KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	TARGET			
					I	II	III	IV
1	Pembinaan Kearsipan Lingkup Daerah Wilayah Barat	Meningkatnya Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan Instansi Daerah Wilayah Barat	Indeks Peningkatan Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan Instansi Daerah Wilayah Barat	3,62 Indeks	-	Melakukan pendampingan dalam penyusunan instrumen kearsipan sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	Mendorong identifikasi arsip terjaga dan arsip aset pada instansi pemerintah	Peningkatan Kapabilitas penyelenggaraan kearsipan diperoleh dengan membandingkan jumlah daerah yang memiliki nilai rata-rata CC ke atas dalam LAKE dengan keseluruhan jumlah lembaga kearsipan wilayah barat dan dikonversi menjadi indeks B
			- Jumlah Lembaga Pemerintah Wilayah Barat yang Dibina untuk Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan	39 Provinsi/Kab/Kota	Workshop Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan (39 Prov/Kab/Kota)	-	Evaluasi Kegiatan Pembinaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	-
			- Jumlah Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang menerima pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset	15 Provinsi/Kab/Kota	Identifikasi instansi pemerintah yang akan menerima pembinaan pengelolaan arsip terjaga dan arsip aset	Bimbingan Teknis Pembinaan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset pada Pemerintah Daerah	Evaluasi Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset	-

Lampiran 4

LAPORAN CAPAIAN FISIK PERIODE TAHUN ANGGARAN 2023

KEARSIPAN DAERAH II

LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK (CAPAIAN OUTPUT)
Periode Desember 2023

Kontribusi : 007 ARSEP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Unit Organisasi : 01 ARSEP NASIONAL
Satuan Kerja : 000601 ARSEP NASIONAL R.1 JAKARTA

Uraian	PAGU SEWAK (angka bulat)	REALISASI KEUANGAN				SISA ANGGARAN	TARGET OUTPUT	REALISASI FISIK/CAPAIAN OUTPUT				Membatas Pelaksanaan	Tidak Laju Rambat
		s.d. NOVEMBER		DESEMBER				s.d. NOVEMBER		DESEMBER			
		(Rp)-	%	(Rp)-	%			Volume Capaian	Progres %	Volume Capaian	Progres %		
001-0000 Pembinaan Keuangan Internal	5.000.760.000	5.007.860.074	96,30%	6.113.000	0,10%	96.198.000							
001.001 Facilities dan Peralatan Penerimaan Daerah	200.740.000	200.388.900	99,31%	0	0,00%	2.180.000	01 Desamb (Plan-Sub-Ses)	00	100,00%	0	0,00%		
001.001.001 Lembarang Penerimaan Daerah (Tipe) dan lain-lain (termasuk pembelian dan sewa) (Pengadaan Barang)	100.100.000	100.100.000	99,94%	0	0,00%	10.000	01 Desamb (Plan-Sub-Ses)	00	100,00%	0	0,00%		
001.001.002 Belanja Taksi Langat dan lain-lain (Pengadaan)	100.640.000	100.288.900	99,58%	0	0,00%	18.000							
001.001.001.SA TAMPAK SUB KEGIATAN	100.640.000	100.288.900	99,98%	0	0,00%	10.000	01 Desamb (Plan-Sub-Ses)						
001.001.002.001 Dukungan Kegiatan Pembinaan Taksi Langat (Pengadaan)	1.000.000	1.000.000	100,00%	0	0,00%	0							
001.001.002.001.SA TAMPAK SUB KEGIATAN	1.000.000	1.000.000	100,00%	0	0,00%	0							
001.001.002.002 Lembarang Penerimaan Daerah (Tipe) dan lain-lain (termasuk pembelian dan sewa) (Pengadaan Barang)	100.640.000	100.288.900	96,74%	0	0,00%	8.000	01 Desamb (Plan-Sub-Ses)	00	100,00%	0	0,00%		
001.001.002.002.001 Pembelian Sistem Penerimaan yang akan menerima Pembinaan Penghasilan Langat	3.000.000	3.000.000	100,00%	0	0,00%	0							
001.001.002.002.001.SA TAMPAK SUB KEGIATAN	3.000.000	3.000.000	100,00%	0	0,00%	0							
001.001.002.002.002 Belanja Taksi Pembinaan Penghasilan Langat yang akan menggunakan Fasilitas Penerimaan	76.740.000	76.288.900	99,30%	0	0,00%	2.000.000							
001.001.002.002.002.SA TAMPAK SUB KEGIATAN	76.740.000	76.288.900	99,30%	0	0,00%	2.000.000							
001.001.002.002.003 Dukungan Kegiatan Pembinaan Penghasilan Langat (Pengadaan)	27.260.000	27.000.000	99,04%	0	0,00%	11.000							
001.001.002.002.003.SA 1000 Dukungan Pembinaan Penghasilan Langat (Pengadaan)	27.260.000	27.000.000	91,29%	0	0,00%	11.000							
001.002 Facilities dan Peralatan Penerimaan Daerah	3.940.000.000	3.937.210.771	99,18%	6.113.000	0,16%	82.270.000	01 Desamb (Plan-Sub-Ses)	00	100,00%	0	0,00%		
001.002.001 Sarana Penerimaan Daerah (Tipe) dan lain-lain (termasuk pembelian dan sewa) (Pengadaan Barang) (Peralatan Elektronik (Sarana))	3.940.000.000	3.937.210.771	99,18%	6.113.000	0,16%	82.270.000	01 Desamb (Plan-Sub-Ses)	00	100,00%	0	0,00%		
001.002.001.001 Belanja Peralatan Elektronik (Sarana)	200.510.000	200.160.000	99,28%	0	0,00%	13.180.000							
001.002.001.001.SA Pengadaan Peralatan	200.510.000	200.160.000	99,28%	0	0,00%	13.180.000							
001.002.001.002 Pembelian dan Sewa Peralatan Elektronik (Sarana)	70.990.000	70.990.000	99,99%	0	0,00%	0							
001.002.001.002.SA TAMPAK SUB KEGIATAN	70.990.000	70.990.000	99,99%	0	0,00%	0							
001.002.001.003 Belanja Taksi Pembinaan Penghasilan Langat (Sarana)	1.769.500.000	1.768.060.771	99,30%	5.000.000	0,28%	20.010.000							
001.002.001.003.SA Sewa Kebutuhan Peralatan Elektronik (Sarana)	368.800.000	367.810.000	99,46%	2.000.000	0,54%	10.000.000							
001.002.001.003.001 Belanja Taksi Pembinaan Penghasilan Langat (Sarana)	1.390.700.000	1.390.250.771	99,95%	0	0,00%	10.010.000							
001.002.001.003.001.SA Belanja dan Sewa Peralatan Elektronik (Sarana)	278.000.000	278.000.000	99,61%	1.000.000	0,36%	10.000.000							
001.002.001.003.001.SA TAMPAK SUB KEGIATAN	278.000.000	278.000.000	99,61%	1.000.000	0,36%	10.000.000							

Jakarta, 2 Januari 2024
Mengetahui,
Direktur Kearsipan Daerah II


Suminaruh, S.S., M.Hum
NIP.197209072000032001

PRINT OUT LAPORAN MONEV
PERIODE TAHUN ANGGARAN 2023

REKAP PELAPORAN KOMPONEN
TRIWULAN IV (PARSIAL)

Tahun : 2023
K/L : 087 - ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UK. Eselon I : 01 - Arsip Nasional
UK. Eselon II : 19 - Direktorat Kearsipan Daerah II

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
6660.FBA.002 - Lembaga Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang Dibina untuk Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan														
1	051 Workshop Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Selesai	Kegiatan Workshop Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan telah selesai dilaksanakan bulan Februari.	100.00	Daerah	39	0		100.624.000	0	0.00%	Sudah	Penerima Manfaat	Banyaknya Pemerintah Daerah yang belum memiliki instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis, Minimnya SDM di daerah
2	052 Evaluasi Kegiatan Pembinaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Selesai	Kegiatan Evaluasi Kegiatan Pembinaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan telah dilaksanakan pada November 2023	100.00	Laporan	1	1		1.500.000	1.500.000	100.00%	Sudah	Penerima Manfaat	Banyaknya Pemerintah Daerah yang belum memiliki instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis, Minimnya SDM di Daerah
6660.FBA.004 - Lembaga Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset														
3	053 Evaluasi Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset	Selesai	Telah dilaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Evaluasi Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2023	100.00	Laporan	1	1		27.891.000	27.476.119	98.51%	Sudah	Penerima Manfaat	Banyak OPD di daerah yang belum cukup wawasan tentang kriteria arsip aset dan terjaga. Terlambat arsip aset yang diserahkan namun dokumen belum terbit. Pengelolaan arsip aset belum sistematis sesuai dengan kaidah kearsipan

5 Jan 2024

1/5

Rekap Komponen Triwulan IV [Parsial]

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
4	051 Identifikasi Instansi Pemerintah yang akan menerima Pembinaan Pengelolaan Arsip	Selesai	Kegiatan Rapat Pembahasan Identifikasi Instansi Pemerintah yang akan menerima Pembinaan Pengelolaan Arsip telah selesai dilaksanakan	100.00	Laporan	1	0		3.000.000	0	0.00%	Sudah	Waktu	Kepadatan jadwal dan tingginya mobilitas personil di unit menyebabkan agak sulitnya menemukan waktu yang sesuai untuk melakukan pembahasan identifikasi dimaksud
5	052 Bimbingan Teknis Pembinaan Pengelolaan Arsip terjaga dan arsip aset kepada Instansi Pemerintah	Selesai	Telah dilaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Pembinaan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset di Provinsi Jawa Barat Pada tanggal 8 s.d 10 Maret 2023 (Wilayah Barat I: 5 daerah), serta di Provinsi Kepulauan Riau pada 6 s.d 8 Maret 2023 (Wilayah Barat II: 5 daerah). RO Lembaga Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset, untuk capaian fisik sampai dengan akhir Desember sebanyak 10 daerah dengan target 15 daerah, hal ini dilaksanakan pagu di blokir/automatically adjustment sehingga yang awalnya total RO Sarker untuk kegiatan dimaksud adalah 15 daerah, berubah menjadi 10 daerah	100.00	Daerah	15	0		72.770.000	0	0.00%	Sudah	Anggaran	RO Lembaga Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset, untuk capaian fisik sampai dengan akhir Desember sebanyak 10 daerah dengan target 15 daerah, hal ini dilaksanakan pagu di blokir/automatically adjustment sehingga yang awalnya total RO Sarker untuk kegiatan dimaksud adalah 15 daerah, berubah menjadi 10 daerah
6660.UBA.002 - Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (Srikandi)														
6	052 Pendampingan Konfigurasi Data Penerapan Aplikasi SRIKANDI	Selesai	Telah dilaksanakan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Pemantapan Tim Teknis Penerapan Aplikasi SRIKANDI di Jakarta pada Mei 2023	100.00	Laporan	1	0		72.908.000	0	0.00%	Sudah	Barang / Material	Dari segi teknis aplikasi sering mengalami gangguan
7	051 Workshop Penerapan Aplikasi SRIKANDI	Selesai	Rapat Pembahasan Penerapan Aplikasi SRIKANDI November 2023	100.00	Laporan	1	0		228.319.000	200.961.000	88.02%	Sudah	Barang / Material	Aplikasi SRIKANDI sering mengalami gangguan/error

5 Jan 2024

2/5

Rekap Komponen Triwulan IV [Parcial]

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
8	054 Monitoring Dan Evaluasi Penerapan Aplikasi SRIKANDI	Selesai	Telah dilakukan Rapat Evaluasi pasca kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Aplikasi SRIKANDI di Jakarta pada tanggal 13-14 November 2023	100.00	Laporan	1	1		279.668.000	151.477.610	54.16%	Sudah	Barang / Material	Seringnya gangguan yang terjadi saat implementasi aplikasi Srikandi
9	053 Bimbingan Teknis Pendampingan Penerapan Aplikasi SRIKANDI	Selesai	Telah dilakukan Rapat Evaluasi pasca kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi SRIKANDI telah selesai dilaksanakan bagi 85 daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) pada Agustus 2023	100.00	Daerah	85	0		1.764.105.000	2.238.235	0.13%	Sudah	Barang / Material	Aplikasi SRIKANDI sering mengalami gangguan/error dari pusat

5 Jan 2024

3/5

Rekap Komponen Triwulan IV [Parcial]